

STANDAR GLOBAL PENDIDIKAN PEKERJAAN SOSIAL DAN KRITIK TERHADAP KURIKULUM PENDIDIKAN PEKERJAAN SOSIAL DI INDONESIA *(Global Standard on Social Work Education and Suggestion to the Curriculum of Social Work Education in Indonesia)*

Adi FAHRUDIN¹⁾

Abstract. Global change and trends toward industrialization and privatization have encouraged transformation and social institutions. Therefore, this has been a growing need to reform curriculum for social work education in Indonesia, it was suggested that competency based social work education would be appropriated to the current social situation in Indonesia.

Key words: Social work, Global standard on social work education, Curriculum, Social transformation

1. PENDAHULUAN

Praktek dan pendidikan pekerjaan sosial mestilah diberi tumpuan yang sepenuhnya. Ini bukan saja karena transformasi global yang kini berlaku dan kesannya ke atas Indonesia, tetapi juga karena Indonesia sendiri sedang berusaha keras untuk keluar dari situasi krisis ekonomi, sosial dan politik yang tidak kunjung reda sejak pertengahan tahun 1997 (Adi Fahrudin, 1999).

Perubahan global, trends industrialisasi dan swastanisasi telah menyebabkan transformasi berlaku pada institusi sosial yang menjadi identitas

bangsa. Tarikan proses globalisasi telah menimbulkan kesan yang nampak dipermukaan yaitu semakin seriusnya permasalahan sosial seperti meningkatnya masalah gangguan mental, kenakalan remaja, perlakuan salah terhadap anak (child abused), anak-anak jalanan (street childrens), orang dewasa jalanan (street adult), penyalahgunaan NAPZA, seks bebas, pelacuran dan penyakit HIV/ AIDS (Adi Fahrudin, 1998).

Transisi sosio-budaya bukan saja memerlukan pengubahsuaian (*adaptation adjustment*) tetapi juga penongkatan kadar dan mutu pelayanan sosial untuk menangani dan mencegah masalah-masalah sosial yang semakin serius (Adi

¹ Makalah disajikan dalam Seminar Nasional mengenai Pendidikan Pekerjaan Sosial di Indonesia yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung bertempat di AULA STKS Bandung pada 2-3 maret 2004

Fahrudin, 1997). Untuk meningkatkan kadar dan mutu pelayanan sosial tersebut diperlukan tenaga yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi professional yang itu tidak lain hanya dapat dihasilkan melalui pendidikan dan latihan secara professional pula (Adi Fahrudin, 1999).

Permasalahan sosial baik kuantitas dan kualitasnya terus meningkat sejalan dengan proses runtuhnya nilai-nilai murni dalam masyarakat yang berasal dari institusi keluarga, politik bahkan agama. Perubahan-perubahan sosio-budaya, ekonomi bahkan politik yang begitu cepat pada era globalisasi ini telah memberi implikasi kepada profesi pekerjaan sosial (Parsloe, 1994). Implikasi itu adalah apakah profesi pekerjaan sosial di suatu negara mampu menjawab tantangan dan perubahan tersebut ataukah profesi pekerjaan sosial hanya diam di tempat, stagnan, impotensi dan mandul serta membiarkan tugas-tugas fungsional dan professional mereka diambilalih profesi lain.

Transisi sosial dengan berbagai permasalahan sosial yang jumlahnya semakin meningkat memerlukan tindakan yang lebih professional khususnya oleh para pekerja sosial yang terlatih dalam bidang pekerjaan sosial (Ismail Baba, 1998). Hal ini disebabkan pekerjaan sosial mempunyai komitmen nilai dan praktis untuk mengatasi masalah sosial yang ada. Akan tetapi menurut Dolgoff (1974) agar profesi pekerjaan sosial dapat memberikan layanan sosial yang tepat sangat tergantung pada tiga faktor utama yaitu prioritas pelayanan sosial harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, system organisasi pemberi pelayanan yang modern dan komprehensif dan *kualitas tenaga* yang menjalankan tugas-

tugas dimaksud.

Untuk mencapai maksud diatas, pendidikan dan latihan pekerjaan sosial memegang peranan penting dalam menyiapkan tenaga profesional yang mempunyai komitmen terhadap profesi (Adi Fahrudin, 1999). Persoalannya adalah bagaimana pendidikan dan latihan pekerjaan sosial tersebut dapat selaras dengan tuntutan dan perubahan global serta menjawab permasalahan sosial local pada sebuah negara seperti Indonesia. Selain pembenahan dalam banyak factor seperti fasilitas pendidikan, system rekrutmen mahasiswa, kualitas dan kualifikasi tenaga pengajar, metode pembelajaran, sosialisasi professional dan interaksi pendidikan, maka pembenahan kurikulum pendidikan pekerjaan sosial amatlah penting untuk diberi perhatian (Adi Fahrudin, 1998).

2. STANDAR GLOBAL PENDIDIKAN PEKERJAAN SOSIAL

Perdebatan apakah pekerjaan sosial itu profesi atau bukan, bidang profesional atau bukan, telah lama ditinggalkan orang. Dewasaini, dalam pergaulan antar profesi dan disiplin ilmu, diakui bahwa pekerjaan sosial merupakan suatu profesi pertolongan, oleh sebab itu pekerjaan sosial merupakan bidang professional. Oleh karena pekerjaan sosial merupakan bidang professional maka pendidikan dan latihannya pun harus bercorak professional. Corak professional itu sepatutnya tercermin dari system administrasi pendidikannya dan juga pengelolaan pendidikan khususnya proses belajar dan pembelajaran.

Terdapat beberapa *premis* yang menjadi landasan dalam pengelolaan pendidikan professional pekerjaan sosial yaitu:

- Tujuan pendidikan pekerjaan sosial adalah untuk menyiapkan pekerja sosial professional yang memiliki kompetensi, efektif dan yang memiliki komitmen terhadap praktek termasuk pelayanan bagi orang miskin dan tertindas dan bekerja untuk mengurangi kemiskinan, ketertindasan, dan diskriminasi.
- Pendidikan pekerjaan sosial adalah berdasarkankerangka pengetahuan, nilai-nilai dan ketrampilam-ketrampilan professional yang khusus. Hal ini dilandasi sejarah dan filosofi pekerjaan sosial itu sendiri. Pendidikan profesi adalah untuk memajukan pembangunan dan peningkatan pengetahuan, ketrampilan praktek, dan pelayanan untuk kesejahteraan manusia dan memajukan prinsip keadilan sosial dan ekonomi. Pendidikan pekerjaan sosial juga bertanggungjawab menghasilkan dan menerapkan penelitian dan tahap keserjanaan (*scholarship level*) yang tinggi dengan tujuan utama untuk peningkatan praktek pekerjaan sosial.
- Pendidikan pekerjaan sosial diselenggarakan dari jenjang pendidikan Sarjana (S1), Master (S2), Doktor (S3).
- Program pendidikan pekerjaan sosial memelihara kedekatan, hubungan timbal balik dan hubungan yang sedia ada dengan para praktisi pekerjaan sosial dan dengan kelompok-kelompok dan

organisasi-organisasi untuk mamajukan, memberikan, atau mencari pengaruh dalam pembuatan kebijakan dan pelayanan pekerjaan sosial. Tanggungjawab untuk memulakan inisiatif dan membangun hubungan seperti ini berada pada program pendidikan pekerjaan sosial.

- Efektifitas suatu profesi tergantung pada penglibatan aktif anggota-anggota dalam profesi tersebut dalam pendidikan berkelanjutan (*continuing education*). Program pendidikan pekerjaan sosial bertujuan untuk memajukan pengembangan professional yang berkelanjutan kepada mahasiswa dan juga staf pengajar. Program atau jurusan pekerjaan sosial harus mengajarkan bagaimana menjadi *learner* sepanjang hayat yang mempunyai motivasi secara terus menerus mengembangkan pengetahuan baru dan ketrampilan melalui pengalaman kerja mereka.
- Program pendidikan pekerjaan sosial yang efektif mengakui saling ketergantungan (*interpendence*) antar negara dan keperluan untuk kerjasama professional di seluruh dunia.
- Program pendidikan pekerjaan sosial berasumsi bahwa suatu peranan kepemimpinan yang berkaitan dengan profesi dimanifestasikan dalam bentuk penyajian kurikulum yang mengedepankan sesuatu yang baru dan perubahan dasar pengetahuan pekerjaan sosial dan dari disiplin-disiplin lain yang mendukung (CSWF, 2002; IASSW, 2000).

Berdasarkan premis diatas, maka tujuan pendidikan pekerjaan sosial adalah memungkinkan mahasiswa dapat mengintegrasikan pengetahuan, nilai-nilai dan ketrampilan-ketrampilan profesi pekerjaan sosial ke dalam kompetensi praktek. Diperingkat sarjana/S1 (*baccalaureate*), tujuannya adalah menyiapkan mahasiswa untuk praktek pekerjaan sosial generalis (*generalist social work practice*), sedangkan diperingkat master tujuannya adalah menyiapkan mahasiswa untuk praktek pekerjaan sosial lanjutan dalam suatu bidang konsentrasi (*advance social work practice in field of concentration*). Perbedaan antar jenjang pendidikan ini yaitu dari segi kedalaman (*depth*), keluasan (*extended*) dan kekhususan pengetahuan dan keterampilan (*knowledge and skill*) sehingga mahasiswa dapat mensintesis dan menerapkannya ke dalam praktek pekerjaan sosial secara utuh. Antara jenjang (*level*) pendidikan pekerjaan sosial harus menyediakan kurikulum yang memberi pondasi professional yang mengandung kerangka pengetahuan yang sama, nilai dan keterampilan. Kesamaan dasar ini ditransfer ke dalam bentuk setting, kelompok populasi dan bidang-bidang masalah dimana mereka menjalani praktek. Pada peringkat sarjana, pendidikan pekerjaan sosial harus memasukan perspektif pengetahuan liberal (*liberal knowledge*) dan isi (*content*) fondasi professional, yang mana tujuannya adalah menyiapkan mahasiswa untuk pemberian layanan langsung dengan system klien yang berbeda jenis dan ukurannya (CSWE, 2002; IASSW, 2000).

Dengan tujuan seperti telah dinyatakan di atas maka menurut hemat saya, semua lulusan sarjana(S1) pekerjaan

sosial sepatutnya mampu untuk:

- Menerapkan keterampilan berfikir secara kritis secara ke atas konteks praktek pekerjaan sosial pendidikan.
- Menjalankan praktek yang dilandasi nilai dan etika profesi pekerjaan sosial dan memahami serta menghargai nilai positif yang beraneka ragam.
- Mendemonstrasikan penggunaan diri secara professional (*the professional use of self*).
- Memahami bentuk dan mekanisme penindasan dan diskriminasi dan strategi perubahan untuk meningkatkan keadilan ekonomi dan keadilan sosial.
- Memahami sejarah profesi pekerjaan sosial dan struktur dan isu-isu masa kini.
- Menerapkan pengetahuan dan keterampilan pekerjaan sosial generalis ke dalam praktek dengan system-sistem dari semua tingkatan.
- Menerapkan pengetahuan dari variable bio-psiko-sosial (*biopsychosocial*) yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku individu, dan menggunakan kerangka teoritikal itu untuk memahami interaksi individu-individu dan antara individu-individu dengan system-sistem sosial.
- Menganalisis dampak kebijakan sosial terhadap system klien, pekerja dan badan sosial.
- Melakukan studi atau penelitian evaluasi dan menerapkan temuan-temuan ke dalam praktek, dan

dibawah supervisi, untuk mengevaluasi intervensi praktek mereka sendiri.

- Menggunakan keterampilan berkomunikasi yang berbeda-beda dengan berbagai klien, kolega dan anggota masyarakat.
- Menggunakan supervisi secara tepat untuk praktek generalis.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka kurikulum pendidikan pekerjaan sosial di peringkat sarjana (S1) seharusnya:

- Konten kurikulum berdasarkan standar global pendidikan pekerjaan sosial (IASSW dan IFSW, 2000) yaitu *HBSE, social work value and ethic, diversity, promotion of social and economic justice, population at risk, social welfare policy and services, social work practice, social work research and field practicum* (Adi Fahrudin, 2003a; 2003b; 2003c).
- Kurikulum ini tidak hanya diajarkan dalam pengajaran di kelas melainkan dalam bentuk pengalaman dan praktek lapangan.
- Kurikulum harus bersifat memberikan *pondasi professional* dan belum sampai kepada tahap spesialisasi atau pengkhususan atau penjurusan (IASSW, 2000).
- Desain kurikulum harus mengidentifikasi pendekatan yang koheren dalam memilih dan memadankan penelitian dan teori yang diajarkan.
- Kurikulum harus memperkuat pemahaman mahasiswa, apresiasi ilmiah, dan pendekatan analitikal mereka agar dapat membangun

dasar pengetahuan dalam pemberian pelayanan dan evaluasi praktek yang mereka jalankan.

- Konten kurikulum harus relevan dengan tujuan, filosofi dan misi dari setiap program pendidikan dan harus memfasilitasi mahasiswa memahami bagaimana pengetahuan yang diperoleh berkaitan dengan praktek pekerjaan sosial.
- Praktikum di peringkat sarjana (S1) harus dijalankan minimum 400 jam dengan *supervisi yang intensif* oleh pekerja sosial yang terlatih dan kualifikasi (IASSW, 2000; CSWE, 2002).

4. STANDAR GLOBAL DAN KRITIK TERHADAP KURIKULUM PEKERJAAN SOSIAL DI INDONESIA

Secara jujur harus saya akui bahwa kurikulum pendidikan pekerjaan sosial di Indonesia saat ini tidak komprehensif dan belum dapat dikatakan sejalan dengan standar global pendidikan pekerjaan sosial. Terlalu banyak celah dan bolong-bolong yang dalam kurikulum yang sedia ada. Oleh sebab itu bukan mustahil, para lulusan yang dihasilkan "pincang" dalam penguasaan teori dan keterampilan pekerjaan sosial khususnya pekerjaan sosial generalis. Struktur kurikulum tidak menentukan *sequence* antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain. Hal yang lebih menyedihkan, justru kurikulum tersebut tidak menyediakan pondasi yang kukuh kepada lulusan untuk menjadi pekerja sosial generalis.

Keputusan Mendikbud No. 037/4/1995 tentang kurikulum nasional yang

berlaku disemua jurusan kesejahteraan sosial saat ini terdiri dari 4 bagian yaitu MKDU, MKDK, MKK dan muatan lokal (jurusan). Mata kuliah MKDU yang relevan menurut saya hanya Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan, sedangkan Ilmu Budaya Dasar dan Ilmu Alamiah Dasar tidak jelas relevansinya sebagai MKDU pendidikan pekerjaan sosial.

Mata kuliah MKDK dalam kurikulum yang ada terlalu banyak, bahkan banyak mata kuliah yang *tidak perlu* dan saya sangat yakin dari segi konten mata kuliah dalam kelompok ini terjadi tumpang tindih. Pengantar Sosiologi dan Pengantar Antropologi jika diperlukan dapat disatukan kedalam satu mata kuliah bernama Teori-Teori Sosial. Begitu pula mata kuliah Pengantar Ilmu Politik dan Sistem Politik Indonesia sepatutnya tidak perlu dipisahkan. Sistem Hukum Indonesia sebaiknya tidak berdiri sendiri melainkan harus menjadi satu kesatuan dengan mata kuliah Perundang-Undangan Sosial. Mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia, Asas-asas Manajemen, Dasar-dasar Logika dan Pengantar Statistik Sosial tidak diperlukan sebab sebagian besar akan dibahas dalam konten mata kuliah lain. Jika mata kuliah-mata kuliah yang saya nyatakan tidak perlu tadi dihilangkan atau digabungkan maka memberi peluang untuk mengisi dengan mata kuliah fondasi pekerjaan sosial atau kompetensi dasar yang harus dimiliki pekerja sosial. Dalam MKDK sepatutnya diberikan mata kuliah yang mendasari pemahaman mahasiswa mengenai tingkah laku manusia dalam konteks lingkungan sosial dan pengetahuan dasar mengenai landasan profesi pekerjaan sosial seperti Teori-Teori Sosial, Teori-Teor Psikologi,

Psikologi Perkembangan dan Psikopatologi, HBSE, dan Nilai Etika Pekerjaan Sosial.

Mata kuliah MKK juga disusun secara serampangan. Namanya mata kuliah keahlian maka setiap mata kuliah itu seharusnya mengandung dasar-dasar keahlian yang harus dimiliki mahasiswa sebagai calon pekerja sosial. Mata kuliah Ilmu Kesejahteraan Sosial, Teori Sosiologi dan Perindangan Sosial bukan termasuk dalam ranah mata kuliah keahlian karena memang tidak memberi keahlian kepada mahasiswa. Mata kuliah ini justru merupakan mata kuliah dasar keahlian (MKDK). Lagi pula menyajikan mata kuliah Ilmu Kesejahteraan Sosial tidak mempunyai landasan ilmiah yang kukuh. Sampai saat ini belum ada orang yang mengaku pakar dalam pekerjaan sosial/ kesejahteraan sosial di Indonesia mampu menjabarkan dan menguraikan falsafah keilmuan kesejahteraan sosial. Tidak ada penjelasan dari segi epistemology, aksiologi dan ontology yang mengatakan bahwa kesejahteraan sosial itu sebagai ilmu. Begitu pula penyajian mata kuliah Teori Sosiologi sebagai mata kuliah keahlian secara tersendiri seakan-akan lulusan yang dihasilkan nanti akan menjadi pakar sosiologi dan bukan pekerja sosial. Seorang pekerja sosial yang efektif secara eklektik menggunakan segala teori dalam ilmu sosial dan ilmu perilaku untuk keperluan praktek yang dijalankannya. Oleh yang demikian, tidak perlu pembahasan teori sosiologi secara tersendiri dalam satu mata kuliah. Konten teori sosiologi seharusnya sudah diperkenalkan dalam pengantar ilmu sosial atau teori-teori sosial atau pengantar sosiologi dalam MKDU.

Mata kuliah seperti HBSE sepatutnya dielaborasi ke dalam dua

bagian. HBSE I dan HBSE II. Mata kuliah ini merupakan *basic knowledge* bagi seorang calon pekerja sosial untuk memahami tingkah laku manusia secara umumnya dan klien mereka nanti. Oleh sebab itu mata kuliah ini lebih sesuai diletakkan ke dalam kelompok MKDK. Begitu juga mata kuliah Metode-metode pekerjaan sosial sebaiknya bisa dijabarkan ke dalam tiga bagian yaitu Praktek pekerjaan sosial individu dan keluarga, praktek pekerjaan sosial dengan kelompok, praktek pekerjaan sosial dengan organisasi dan komunitas. Dengan pemecahan kepada tiga bagian ini maka keahlian yang diberikan kepada mahasiswa bersifat komprehensif dan memungkinkan mereka dapat melakukan pekerjaan sosial generalis sebagaimana tujuan pendidikan diperingkat sarjana.

Kurikulum local khususnya kurikulum konsentrasi seharusnya tidak berarti pengkhususan atau penjurusan seperti yang berlaku di STKS Bandung. Oleh sebab itu menurut saya adalah terlalu naif untuk membuat pemetaan kepada pengkhususan atau penjurusan di peringkat sarjana (S1/D4). Berdasarkan scenario global pendidikan pekerjaan sosial yang dikeluarkan IASSW tahun 2002, tidak ada dan belum ditemui model penjurusan di peringkat sarjana (S1) di seluruh dunia. Pengkhususan atau penjurusan hanya ada di peringkat Master namun inipun tidak semua negara melaksanakannya. Hal ini karena pendidikan peringkat S1/D4 masih bersifat dasar professional sehingga keterampilan pekerjaan sosial yang diberikan kepada mahasiswa masih bersifat general dan bukan spesialis. Selain itu adalah sangat tidak praktikal, pemborosan dan sesuatu yang *utopia* untuk membuat pengkhususan atau

penjurusan. Meskipun saya tidak memiliki data yang valid mengenai kualifikasi pendidik pekerjaan sosial di Indonesia, namun saya percaya hampir semua PTN/PTS yang mengembangkan jurusan ini tidak didukung oleh sumber daya berupa tenaga pendidik pekerjaan sosial yang benar-benar berlatar belakang pekerjaan sosial. Di negara-negara ASEAN seperti Philipina, Thailand, tenaga pendidik pekerjaan sosial harus sekurang-kurangnya berlatar belakang S2 pekerjaan sosial. Di Singapura dan bahkan di beberapa universitas di Malaysia telah menerapkan kualifikasi minimum menjadi pendidikan pekerjaan sosial adalah S3 pekerjaan sosial. Dengan situasi seperti di atas maka pendidikan pekerjaan sosial di Indonesia yang sedia ada saat ini belum dapat memenuhi standar kualifikasi global pekerjaan sosial yang bersifat generalis apalagi memenuhi standar kualifikasi professional yang khusus seperti pekerjaan sosial klinis, pekerjaan sosial medis dan lain-lain.

Pada kurikulum jurusan/pengkhususan seperti yang terjadi di STKS Bandung justru menjadi rancu karena justru terdapat mata kuliah MKDU, MKDK dan MKK seperti Psikologi Umum, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Psikologi Klinis, Teori Pekerjaan Sosial, Analisa Masalah Sosial, Nilai dan Etika Profesi Pekerjaan Sosial dan Komunikasi dan Relasi Pekerjaan Sosial.

Berdasarkan pengalaman dari banyak negara tetangga seperti Singapura, Thailand, Philipina dan Malaysia maka pendidikan pekerjaan sosial bukan berdiri sendiri, *one-organization-show*, melainkan hasil diskusi yang panjang dan melelehkan diantara organisasi yang berkait dengan pekerjaan sosial. Dalam

konteks indonesai, pendidikan pekerjaan sosial seharusnya bentuk dan kolaborasi yang indah dari IPPSI, IPSPI, DNIKS atau *stakeholder* lain. Mlangnya masing-masing membawa haluan dan bendera sendiri-sendiri serta masing-masing merasa paling diperlukan dalam percaturan kepentingan diperingkat local maupun nasional. Untuk itu sebagai langkah pertama adalah perlu rembuk nasional diantara komponen-komponen yang terkait dengan pendidikan pekerjaan sosial untuk mencari kesamaan visi, misi dan komitmen dalam memajukan profesi pekerjaan sosial di Indonesia. Kedua adalah menghadirkan pakar-pakar dari negara-negara ASEAN yang mempunyai persamaan karakteristik sosio-ekonomi-budaya dengan kita, dan mereka ini mempunyai pengalaman memajukan pendidikan pekerjaan sosial dan profesi pekerjaan sosial di negara mereka. Kita tidak perlu merasa minder belajar dari rekan-rekan kita di sekitar ASEAN. Pakar pekerjaan sosial dari Philipina misalnya diperlukan karena pengalaman mereka mewujudkan Akta Republik No. 4373 yang biasa disebut Undang-Undang Pekerjaan Sosial (Social Work Law) yang telah wujud sejak tahun 1965. dengan undang-undang inilah statusprofesi pekerjaan sosial dan pendidikan pekerjaan sosial di Philipina terjaga kualitasnya. Bahkan lulusan S1 pekerjaan sosial di Philipina diwajibkan lulus ujian yang diadakan oleh Dewan Penguji sebelum seorang lulusan dapat mempraktek profesi pekerjaan sosial. Bahkan dalam undang-undang tersebut juga dinyatakan bahwa sebelum seseorang dapat mengikuti ujian tersebut, yang bersangkutan harus memenuhi 1000 jam latihan praktek dibawah supervise pekerja sosial yang terlatih dan berkualifikasi (Adi Fahrudin, 2003). Begitu juga dengan pakar pekerjaan sosial

dari Thailand, Singapura bahkan dari Malaysia. Mereka memiliki pengalaman bagaimana mencapai tahap profesionalisme pekerjaan sosial dan juga bagaimana memajukan pendidikan pekerjaan sosial di negara mereka.

5. KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI YANG KOMPETITIF: SEBUAH GAGASAN

Kita sadar bahwa menyusun kurikulum pendidikan professional bukanlah mudah. Diperlukan kepakaran, ketelitian dan diskusi yang intensif untuk mewujudkan hal itu. Kurikulum pendidikan pekerjaan sosial apalagi di peringkat sarjana/D4 seharusnya kurikulum dasar yang memberi kompetensi professional dasar yang umumnya harus dimiliki pekerja sosial generalis. Perlu diingat bahwa pendidikan pekerjaan sosial peringkat sarjana diseluruh dunia saat ini hanya bersifat generalis. Penekanan yang perlu diberi perhatian adalah kurikulum yang disajikan hendaknya komprehensif dan yang menyediakan kompetensi umum sebagai seorang pekerja sosial generalis (Coulshed, 1993; Park, 1985).

Selain itu, kurikulum pendidikan pekerjaan sosial haruslah bersifat kompetitif yaitu yang dapat memberi nilai tambah (*value added*) kepada para lulusan dalam persaingan di dunia kerja (Adi Fahrudin, 2002). Oleh demikian membuat jurusan dengan tujuan pengkhususan (spesialisasi) diperingkat S1/D4 secara tajam seperti yang terjadi di STKS saat ini amat sangat berlebihan. Bahkan diperingkat Master sekalipun tidak merupakan jurusan atau

MKDU 10 SKS

No.	Mata Kuliah	SKS
1	Pendidikan Agama	2
2	Pendidikan Pancasila	2
3	Pendidikan Kewarganegaraan	2
4	Bahasa Indonesia	2
5	Bahasa Inggris	2

MKDK 54 SKS

No.	Mata Kuliah	SKS
1	Ekonomi untuk Pekerja Sosial	3
2	Sosiologi untuk Pekerja Sosial	3
3	Pengantar Politik dan Sistem Pemerintahan Indonesia	3
4	Hukum dan Perundang-Undangan Sosial untuk Pekerja Sosial	3
5	Psikologi untuk Pekerja Sosial	3
6	Psikologi perkembangan	3
7	Teori-Teori Sosial dan Pekerjaan Sosial	3
8	Psikopatologi	3
9	Metode Penelitian Sosial	3
10	Tingkah Laku Manusia dalam Lingkungan Sosial I	3
11	Tingkah Laku Manusia dalam Lingkungan Sosial II	3
12	Sistem Usaha Kesejahteraan Sosial	3
13	Laboratorium Pekerja Sosial	3
14	Teori-Teori Pekerjaan Sosial	3
15	Pembangunan Sosial dan Pekerjaan Sosial	3
16	Konflik, Mediasi dan Resolusi Konflik	3
17	Kesehatan Mental untuk Pekerja Sosial	3
18	Managemen Organisasi untuk Pekerja Sosial	3
19	Filsafat, Etika dan Hak-Hak Azasi Manusia	3

MKK 57 SKS

No.	Mata Kuliah	SKS
1	Kebijakan dan Perencanaan Sosial	3
2	Administrasi dan Organisasi Pelayanan Manusia	3
3	Penelitian Pekerjaan Sosial	3
4	Statistik dan Analisis Data untuk Pekerjaan Sosial	3
5	Pencatatan dan Pelaporan dalam Pekerjaan Sosial	3

6	Teknologi dan Sistem Manajemen Informasi untuk Pekerja Sosial	3
7	Praktek Pekerjaan Sosial dengan Individu dan Keluarga	3
8	Praktek Pekerjaan Sosial dengan Kelompok	3
9	Praktek Pekerjaan Sosial dengan Organisasi dan Komunitas	3
10	Modifikasi Tingkah Laku dalam Pekerjaan Sosial	3
11	Supervisi dalam Pekerjaan Sosial	3
12	Manajemen Kasus (Case Management) dalam Pekerjaan Sosial	3
13	Konseling dalam Pekerjaan Sosial	3
14	Intervensi Krisis dan Psikoterapi	3
15	Praktikum I	6
16	Advokasi Sosial	3
17	Teknologi dan Manajemen Informatika untuk Pekerja Sosial	3
18	Praktek Pekerjaan Sosial dalam Masyarakat dalam Multi Budaya (<i>social work practice in multiculture society</i>)	3

Dengan kerangka di atas maka terbuka peluang bagi setiap sekolah-sekolah pekerjaan sosial (PTN/PTS) mempunyai strength atau kelebihan baik dari segi sumber daya manusia maupun fasilitas pendidikan untuk mengembangkan KONSENTRASI yang lebih kompetitif sebagai berikut:

KURIKULUM LOKAL/KONSENTRASI 20 SKS (Rehabilitasi Sosial)

No.	Mata Kuliah	SKS
1	Teori dan Praktek Rehabilitasi Sosial	3
2	Teknologi Rehabilitasi Sosial	3
3	Praktikum II (sesuai dengan konsentrasi)	6
4	Seminar Kajian Rehabilitasi	2
5	Karya Ilmiah Akhir	6

KURIKULUM LOKAL/KONSENTRASI 20 SKS (Pengembangan Masyarakat)

No.	Mata Kuliah	SKS
1	Teori dan Praktek Pengembangan Masyarakat	3
2	Teknologi Pengembangan Masyarakat	3
3	Praktikum II (sesuai dengan konsentrasi)	6
4	Seminar Kajian Pengembangan Masyarakat	2
5	Karya Ilmiah Akhir	6

KURIKULUM LOKAL/KONSENTRASI 20 SKS (Adminidtrasi dan Managemen Organisasi Pelayanan Manusia)

No.	Mata Kuliah	SKS
1	Manajemen Organisasi Pelayanan Manusia	3
2	Kebijakan dan Perencanaan Program Organisasi Pelayanan Manusia	3
3	Praktikum (sesuai dengan konsentrasi)	6
4	Seminar Kajian Administrasi dan Manajemen Organisasi Pelayanananan Manusia	2
5	Karya Ilmiah Akhir	6

KURIKULUM LOKAL/KONSENTRASI 20 SKS (Pekerjaan Sosial Medik)

No.	Mata Kuliah	SKS
1	Aspek Psikososial Penyakit	3
2	Teori dan Praktek Pekerjaan Sosial Medik	3
3	Praktikum (sesuai dengan konsentrasi)	6
4	Seminar Pekerjaan Sosial Medik	2
5	Karya Ilmiah Akhir	6

KURIKULUM LOKAL/KONSENTRASI 20 SKS (Pekerjaan Sosial Koreksional)

No.	Mata Kuliah	SKS
1	Probasi, Pardon, Parole dan Supervisi Lanjutan	3
2	Teori dan Praktek Pekerjaan Sosial Koreksional	3
3	Praktikum (sesuai dengan konsentrasi)	6
4	Seminar Kajian Pekerjaan Sosial Koreksional	2
5	Karya Ilmiah Akhir	6

KURIKULUM LOKAL/KONSENTRASI 20 SKS (Pekerjaan Sosial Sekolah)

No.	Mata Kuliah	SKS
1	Konseling dan Supervisi Pekerjaan Sosial di Sekolah	3
2	Teori dan Praktek Pekerjaan Sosial Koreksional	3
3	Praktikum (sesuai dengan konsentrasi)	6
4	Seminar Pekerjaan Sosial Sekolah	2
5	Karya Ilmiah Akhir	6

KURIKULUM LOKAL/KONSENTRASI 20 SKS (Pekerjaan Sosial Gerontologi)

No.	Mata Kuliah	SKS
1	Psikososial Penuaan (Psychogerontology)	3
2	Teori dan Praktek Pekerjaan Sosial Gerontologi	3
3	Praktikum (sesuai dengan konsentrasi)	6
4	Seminar Pekerjaan Sosial Gerontologi	2
5	Karya Ilmiah Akhir	6

KURIKULUM LOKAL/KONSENTRASI 20 SKS (Pekerjaan Sosial Industri)

No.	Mata Kuliah	SKS
1	Dimensi-dimensi Pekerjaan	3
2	Teori dan Praktek Pekerjaan Sosial dalam Dunia Kerja	3
3	Praktikum (sesuai dengan konsentrasi)	6
4	Seminar Pekerjaan Sosial Industri	2
5	Karya Ilmiah Akhir	6

KURIKULUM LOKAL/KONSENTRASI 20 SKS (Pekerjaan Sosial Psikiatri)

No.	Mata Kuliah	SKS
1	Psikiatri Anak-anak dan Orang Dewasa	3
2	Teori dan Praktek Pekerjaan Sosial Psikiatri	3
3	Praktikum (sesuai dengan konsentrasi)	6
4	Seminar Pekerjaan Sosial Psikiatri	2
5	Karya Ilmiah Akhir	6

KURIKULUM LOKAL/KONSENTRASI 20 SKS (Pelayanan Sosial Anak dan Keluarga)

No.	Mata Kuliah	SKS
1	Perlindungan Anak-anak	3
2	Terapi dan Konseling Keluarga	3
3	Praktikum (sesuai dengan konsentrasi)	6
4	Seminar Pekerjaan Sosial dengan Anak dan Keluarga	2
5	Karya Ilmiah Akhir	6

KURIKULUM LOKAL/KONSENTRASI 20 SKS (Kebijakan dan Perencanaan Sosial

No.	Mata Kuliah	SKS
1	Analisis Kebijakan, Perencanaan dan Proyek Pembangunan Sosial	3
2	Politik Ekonomi Kebijakan Sosial	3
3	Praktikum (sesuai dengan konsentrasi)	6
4	Seminar Pekerjaan Sosial dengan Anak dan Keluarga	2
5	Karya Ilmiah Akhir	6

pengkhususan melainkan hanya bersifat konsentrasi seperti yang berlaku di *Faculty of Social Administration, Thammasat University, Thailand* atau di *College of Social Work and Community Development, University of the Philippines*.

Belajar dari kekisruhan kurikulum pendidikan pekerjaan sosial di negara kita, maka berdasarkan kompetensi, pengalaman dan tanggungjawab profesional yang ada, saya mencoba mengajukan kerangka kurikulum pendidikan pekerjaan sosial siperingkat sarjana/D4 seperti berikut:

6. PENUTUP

Demikianlah pokok pemikiran saya untuk digunakan dalam diskusi tentang pendidikan pekerjaan sosial di Indonesia. Pokok-pokok pemikiran ini hanya sebagai masukan dalam penyusunan kurikulum pendidikan pekerjaan sosial yang komprehensif, berbasis kompetensi dan bersifat kompetitif. Dengan mengacu kepada pokok-pokok pikiran ini saya yakin corak dan warna pekerjaan sosial profesional di Indonesia umumnya semakin ketara dan jika hal ini dilaksanakan oleh STKS maka saya yakin STKS akan kembali menjadi *center for excellent* acuan dalam pendidikan.

PUSTAKA ACUAN

- Adi Fahrudin. (2003a). *Menuju Piawaian Praktis Kerja Sosial di Malaysia*. Bahan edaran untuk perbincangan dalam pertemuan *Malaysian Joint Commission on Social Work Education*, sempena *Advances Indigenous Social Work Conference* anjuran Social Work Program, Faculty of Social Sciences, University Malaysia Sarawak, 20-23 Oktober 2003.
- Adi Fahrudin, (2003b). Pendidikan dan Latihan Kerja Sosial dan Piawaian praktis kerja sosial di Malaysia. *Bulletin Psikologi*, Bil. 8/Tahun 2003. Kota Kinabalu: Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial, University Malaysia Sabah.
- Adi Fahrudin, (2003c). *Menuju Standar Praktek Pekerjaan Sosial di Indonesia*. Pokok-pokok Pikiran untuk Bahan Diskusi. Cipayung, Bogor, 19 Maret 2003.
- Adi Fahrudin, Makmur Sanusi & Suwantji Siswora Harjo, (2003). *Standar Praktek Pekerjaan Sosial Generalis (Indonesian Association of Professional Social Workers (IAPSW) standards for The Generalist Social Work Practice)*. Cipayung, Bogor, 20 Maret 2003.

- Adi Fahrudin, (2002). *Direction for Social Work Education*. Kota Kinabalu: School of Psychology and Social Work, University Malaysia Sabah.
- Adi Fahrudin and Abdul Halim Othman, (2000). *Social Work Education In University Malaysia Sabah: A Social Work Curriculum Structure at Bachelor Level* (Paper Presented at Round Table Conference on Social Work Education in Malaysia, September 2000, University Sains Malaysia).
- Adi Fahrudin, (1999). *Komitmen Professional di Kalangan Pelajar Kerja Sosial di Indonesia (Professional Commitment Among Social Work Student's in Indonesia)*. PhD Thesis (Social Work), Penang: Institute of Postgraduate Studies, University Sains Malaysia.
- Adi Fahrudin, (1998). "Pekerja (an) di era Global. dalam artikel Pikiran Rakyat, 13 Mei 1998.
- Adi Fahrudin, (1997). *Pendidikan Tinggi Pekerjaan Sosial: Sejarah, Agenda Masalah dan Kegayutannya dengan Pembangunan Nasional*. (Prosiding Seminar Ilmiah Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) se - Malaysia). Penang: Perhimpunan Pelajar Indonesia, University Sains Malaysia.
- Couldshed, V, (1993). Adult Learning: Implication for Teaching in Social Work Education. *British Journal of Social Work*, Vol 23, 1-13.
- Couldshed, V, (1998). Curriculum Design for Social Work Education: Some Problem and Possibilities. *British Journal of Social Work*, Vol. 18 (2), 155-169.
- Council on Social Work Education, (2002). Council on Social Work Education Curriculum Policy Statement for Baccalaureate Degree Programs in Social Work Education. <http://www.cswe.org>
- Dolgoff, R, (1974). *Organizational Structure and Socialization :Educational Interaction and Career Choices in Undergraduate Social Work Student*. Unpublished DSW Dissertation, School of Social Work, Columbia University.
- International Association School of Social Work, (2000). Standard Global for Social Work Education. <http://www.iasw.org/>
- Ismail Baba, (1998). *The Need for Professionalism in Social Work : in the Case of Malaysia* . (Paper Presented at Advancing Social Work Education Seminar, 16-17 November), Kuching: University Malaysia Sarawak.
- Park, Jong-Sam, (1985). "Curriculum Content in Social Work Education: Relevance to Employment". Dalam Abdullah Malim Baginda et al. (Eds.), *Report of the 8th Asia Pacific Regional Seminar on Social Work*. Penang: University Sains Malaysia.
- Parsloe, P, (1994). "Social Work Education in the year 2000". *International Social Work*, Vol. 33, hal. 13-25.